

pp 36-04-018

• RISET GENDER •

MIGRASI LINTAS BATAS DAN SEKSUALITAS DI ASIA TENGGARA

Irwan M. Hidayana

Sejalan dengan proses globalisasi yang sedang melanda dunia perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya pun semakin meningkat. Perpindahan penduduk atau migrasi ini tidak lagi terbatas dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah sebuah negara, tetapi juga melintasi batas-batas negara yang berdampingan bahkan yang berjauhan sekalipun. Di Asia Tenggara sendiri, migrasi lintas batas bukanlah gejala yang baru muncul karena secara historis dan tradisional penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara sering melakukannya khususnya untuk kegiatan ekonomi. Migrasi ke kota untuk mencari kerja, ke pasar-pasar untuk menjual komoditi, ke daerah pedesaan untuk kerja musiman pertanian, ke wilayah pertambangan dan

lain-lain merupakan karakteristik perekonomian dan sejarah Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, pada masa kolonialisme kebijakan memindahkan penduduk dari Jawa ke luar Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan dan pertambangan sudah ada.¹

Namun, dalam dasawarsa terakhir ini migrasi lintas batas di Asia Tenggara tidak hanya dilakukan oleh penduduk yang berada di sekitar garis perbatasan tetapi juga penduduk yang jauh dari perbatasan, bahkan penduduk dari negara yang tidak berbatasan langsung sekalipun. Lebih jauh lagi, migrasi lintas batas dilakukan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam dua atau lebih negara. Jadi perpindahan penduduk tidak lagi merupakan pilihan bebas dari seorang individu.

Dalam studi-studi tentang migrasi, terjadinya perpindahan penduduk ini dapat dilihat dari 3 perspektif yang berbeda. *Pertama*, perspektif klasik *push-pull factors*. Migrasi disebabkan oleh faktor-faktor pendorong di negara asal (kemiskinan, keterbatasan lahan dan kelebihan penduduk) dan faktor-faktor penarik di negara tujuan (khususnya peluang-peluang ekonomi dan keamanan). *Kedua*, perspektif ekonomi politik yang melihat ketimpangan distribusi kekuatan ekonomi dan politik dalam perekonomian dunia. Migrasi dilihat sebagai satu cara untuk memobilisasi tenaga kerja mudah bagi kapitalisme. *Ketiga*, *migration systems approach* yang melihat kaitan yang erat antara arus manusia (*flows of people*) dan arus-arus lainnya seperti teknologi, komoditi, modal dan lain-lain. Pendekatan ini juga melihat bahwa perpindahan dan pergerakan terjadi karena adanya kaitan historis seperti kolonisasi, kehadiran militer, pengaruh politik perdagangan dan penetrasi budaya.

Tulisan ini akan melihat dampak migrasi lintas batas negara terhadap seksualitas para migran dan secara khusus isu kekerasan terhadap migran perempuan Indonesia, termasuk di antaranya trafiking. Sebelumnya akan diuraikan secara ringkas tempat-tempat lintas batas negara yang selama ini dianggap 'rawan' di Asia Tenggara.

Tempat-tempat Lintas Batas Negara di Asia Tenggara: Daratan dan Kepulauan

Dalam hal aliran barang, informasi dan modal, perbatasan adalah wilayah yang netral. Tetapi bila yang terjadi adalah aliran imigran dan pengungsi, maka perbatasan secara ketat dijaga dan dipertahankan

terutama dalam dasawarsa terakhir ini. Di Asia Tenggara daratan (*mainland*) migrasi lintas batas terutama terjadi di wilayah Mekong yang merupakan perbatasan negara-negara Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam dan Cina. Thailand-lah yang 'menderita' sebagai negara tujuan bagi para migran pelintas batas karena kondisi perekonomiannya yang paling baik di wilayah tersebut. Beberapa tahun terakhir ini, mobilitas migran di wilayah ini semakin jauh. Misalnya, dari Kamboja dan Myanmar (Burma) memasuki Thailand untuk selanjutnya ke Malaysia yang umumnya merupakan pekerja berketerampilan rendah. Mayoritas migran dari Kamboja, Myanmar dan Laos bekerja di Bangkok dan wilayah Timur dan Timur Laut Thailand. Mereka bekerja di perkebunan tebu, pekerja konstruksi jalan dan bangunan, buruh pabrik dan industri hiburan. Pada akhir 1990-an diperkirakan ada 800.000 migran Burma di Thailand, 10% diantaranya adalah perempuan.² Pelintas batas dari Myanmar juga memasuki wilayah Thailand di provinsi Ranong dimana banyak terdapat nelayan Burma. Survei yang dilakukan Departemen Perikanan menemukan bahwa sekitar 70% nelayan di Ranong adalah orang Burma.³

Wilayah Mekong perbatasan juga menjadi jalan masuk bagi pekerja seks dari provinsi Yunnan, Cina Selatan. Perempuan Cina biasanya dibawa ke Keng Tung (negara bagian Shan) di Myanmar untuk kemudian dibawa ke Chiang Rai di distrik Mae Sai, Thailand.⁴ Masalah yang lebih kompleks berkembang adalah perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi di kota-kota bagian utara Thailand maupun di Bangkok. Majalah *Time* edisi 4 Februari 2002 melaporkan bahwa anak-anak perempuan di bawah usia 15 tahun dari Myanmar diperdagangkan di distrik Mae Sai dengan harga US\$ 1000.

Di daerah kepulauan Asia Tenggara, persoalan lintas batas negara terjadi di Filipina, Indonesia dan Malaysia. Diaspora penduduk di Filipina bagian selatan – terutama Kepulauan Sulu – ke Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara (negara bagian Sabah, Malaysia) sudah lama berlangsung. Demikian juga sebaliknya dari pulau-pulau di Sulawesi Utara melintasi batas, masuk ke Filipina Selatan terutama ke Mindanao. Tambahan lagi, secara historis, negara bagian Sabah merupakan bagian dari Kesultanan Sulu yang hingga sekarang masih terus menjadi 'perselisihan' antara Malaysia dan Filipina.

Sementara di bagian Barat, pekerja migran dari Indonesia menyeberangi Selat Malaka untuk masuk ke Malaysia. Para migran tidak terbatas pada penduduk pulau Sumatera dan kepulauan sekitarnya, tetapi juga dari wilayah lain Indonesia seperti Jawa, Lombok, Kalimantan, dan Flores. Kalau pun tidak melintasi batas negara, semakin banyak migran dari Jawa yang bekerja atau dipekerjakan di Batam dan daerah-daerah wisata Kepulauan Riau. Di Kalimantan sendiri, perbatasan Indonesia dengan negara bagian Sarawak dan Sabah merupakan pintu gerbang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Dengan pendapatan penduduk di Kuching mencapai US\$ 8500 perkapita/tahun maka merupakan daya tarik yang besar bagi penduduk di wilayah Kalimantan Barat untuk mencari pekerjaan secara legal maupun secara ilegal. Penelitian di Lombok juga memperlihatkan migrasi TKI ke Malaysia membawa dampak ekonomi cukup besar. Pada tahun 1996, *remittance* yang dikirim ke Lombok mencapai 10 milyar rupiah perbulan.⁵

Wilayah perbatasan lainnya adalah Provinsi Papua dengan Papua New Guinea, terutama wilayah Kabupaten Merauke. Tingginya kasus HIV/AIDS di wilayah ini selalu dikaitkan dengan mobilitas nelayan Thailand yang didukung oleh faktor-faktor lain seperti budaya seksual lokal, pelacuran dan migrasi dari wilayah lain di Indonesia.

Tabel 1.

**Pekerja Migran di Asia Tenggara
Berdasarkan Negara Asal dan Negara Tujuan Tahun 2001**

Negara Tujuan/Negara Asal	Malaysia*	Thailand**	Singapura***
Indonesia	888.000	-	38.000
Filipina	24.000	-	-
Myanmar	-	450.022	-
Kamboja	-	56.252	-
Laos	-	56.253	-
Bangladesh	216.000	-	200.000
Lain-lain	72.000	-	-

Sumber : Diolah dari *Migration News*, vol. 9, no. 3, Maret 2002

Keterangan : * Angka perkiraan merupakan jumlah migran legal dan ilegal

** Pekerja migran yang terdaftar selama tahun 2001

*** Migran Indonesia sebagian besar adalah PRT: migran Bangladesh (dan India) sebagian besar adalah buruh konstruksi

Angka-angka dalam Tabel 1 tidak mencerminkan jumlah absolut pekerja migran di setiap negara, mengingat jumlah pekerja migran yang tak berdokumen lebih tinggi daripada yang berdokumen.

Pekerja Migran Indonesia di Asia Tenggara

Secara historis, migrasi sebagian penduduk Indonesia dari satu wilayah ke wilayah lain atau ke negara lain tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kolonialisme Belanda terutama seiring dengan meluasnya kapitalisme perkebunan. Mulai pertengahan abad 19 sampai awal abad 20, terjadi pengiriman tenaga kerja asal Jawa ke koloni Belanda di Suriname dan Kaledonia, selain ke wilayah-wilayah perkebunan di luar Jawa terutama Sumatera. Demikian juga pada masa penjajahan Jepang.⁶

Setelah kemerdekaan, pola migrasi tenaga kerja Indonesia tentu saja mengalami perubahan, meskipun ciri eksploitatifnya tetap bertahan atau bahkan dilanggengkan. Kebijakan migrasi Indonesia pertama termaktub dalam Repelita 1956-1960 ketika pemindahan penduduk (disebut transmigrasi) dilakukan untuk mengurangi tekanan penduduk di Jawa, menyediakan tenaga kerja di luar Jawa, mendukung strategi militer, dan mempercepat proses asimilasi. Kebijakan migrasi internal ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Orde Baru.

Kebijakan migrasi kemudian dikembangkan juga ke luar negeri melalui pengiriman TKI yang kebanyakan *unskilled* atau *semi-skilled*, khususnya mulai Pelita II. Tabel 2 di bawah ini memperlihatkan pengiriman TKI dari Pelita I sampai ke Pelita VI. Data tersebut secara jelas menunjukkan bahwa sejak Pelita III terjadi lonjakan pengiriman TKI, dan jumlah tenaga kerja perempuan jauh melampaui jumlah tenaga kerja laki-laki. Pada Pelita V, misalnya, jumlah TKI perempuan mencapai 67,8% dari total TKI yang dikirim. Data yang lebih mutakhir dari Depnakertrans, selama tahun 1999 dan 2000 jumlah TKI perempuan yang ditempatkan berjumlah 600.061 orang atau 69,5% dari seluruh TKI. Feminisasi pekerja migran ini terus berlanjut yang mengakibatkan perempuan memikul beban lebih berat. Mereka tidak semata-mata bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, tetapi juga harus menghadapi beragam perlakuan diskriminasi dan kekerasan sejak dari daerah asalnya sampai ke negara tujuan bahkan hingga ketika kembali lagi ke tanah airnya.

Tabel 2.

Jumlah Pekerja Migran Selama 6 Pelita

Pelita	Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
I	1969-74	n.a	n.a	5.624
II	1974-79	3.817	13.235	17.042
III	1979-84	55.000	41.410	96.410
IV	1984-89	198.735	93.527	292.262
V	1989-94	442.310	209.962	652.272
VI	1994-99	n.a.	n.a.	1.250.000*

Sumber: Susilo (2002: 53)

Keterangan: *target Pelita VI

n.a= tidak ada data

Angka-angka dalam Tabel 2 merupakan data resmi berdasarkan TKI yang memiliki dokumen lengkap. Namun jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri sesungguhnya lebih banyak dan diperkirakan mencapai sekitar 2 juta orang (*Migration News*, November 2001). Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar merupakan pekerja migran tak berdokumen (*undocumented*) atau lebih sering disebut sebagai migran ilegal yang jelas selalu menghadapi beragam perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang lebih kompleks, utamanya migran perempuan.

Dalam konteks Asia Tenggara, ketertinggalan Indonesia dari Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam perkembangan ekonomi merupakan salah satu faktor yang kuat yang mendorong mengalirnya pekerja migran Indonesia ke negara-negara tersebut. Meningkatnya pekerja migran – terutama laki-laki – ke negara tetangga terdekat, Malaysia, mulai terjadi pada tahun 1980-an yang sebagian besar diserap oleh sektor perkebunan dan industri properti (konstruksi bangunan). Namun pada tahun 1990-an kecenderungan pekerja migran perempuan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia dan Singapura juga meningkat, selain ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Timur. Pada periode tahun 1999 sampai dengan Juni 2001 jumlah TKI yang dikirim ke negara-negara Asia Tenggara sudah melampaui jumlah TKI yang ditempatkan di Timur Tengah yaitu 456.616 orang berbanding dengan 334.102 orang.⁷

Tabel 3.
Perbedaan Tingkat Upah Indonesia dan Malaysia

Tahun	Daerah Asal	Upah di Indonesia	Upah di Malaysia	Selisih(%)
1990	Lombok	Rp. 500-1000 perhari	Rp. 7.000-8.000 perhari (di perkebunan)	800
1989	Indonesia	S\$70-S\$100 perbulan	S\$ 300 perbulan	300
1984	Jawa Timur	Rp. 3000 per hari	Rp. 9000 perhari	300
1982	Tanjung Pinang	Rp. 1.500 per hari	Rp. 7.000 per hari	467
1982	Bawean	Rp. 500 per hari	Rp. 9.000 per hari	1.800

Tabel 3 memperlihatkan bagaimana perbedaan tingkat upah yang cukup besar menjadi daya tarik utama para pekerja migran untuk berbondong-bondong pergi ke Malaysia. Di sisi lain, rendahnya kesempatan kerja di daerah asal mendorong orang melakukan migrasi ke luar. Namun, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki menyebabkan sebagian besar pekerja migran Indonesia bekerja di sektor-sektor yang lebih membutuhkan kekuatan fisik. Penelitian Berliani di Lombok Timur (1999) mengungkapkan dari 120 migran laki-laki, 70% lebih di antaranya hanya mencapai tingkat pendidikan SD (tamat atau tidak tamat) sehingga sekitar 80% kemudian bekerja sebagai buruh perkebunan dan buruh bangunan di Malaysia. Kita dapat menduga bahwa tingkat pendidikan migran perempuan umumnya juga rendah, karena di wilayah pedesaan seringkali akses perempuan terhadap pendidikan lebih terbatas daripada laki-laki. Anak perempuan masih dipandang tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena nantinya akan berurusan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat domestik. Pandangan seperti ini tercermin jelas pada kebijakan pemerintah yang mengutamakan penempatan TKI sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga).

Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Perempuan

Seseorang yang berminat mencari kerja di luar negeri harus melalui sebuah proses panjang mulai dari rekrutmen, pelatihan, persiapan dokumen, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan kembali. Dalam menjalani prosedur tersebut, para migran perempuan selalu mengalami beragam perlakuan yang diskriminatif dan bisa bermuara pada kekerasan terhadap diri mereka. Pada proses awal rekrutmen, peranan calo amat besar yang tidak terbatas pada memberikan informasi

pekerjaan tetapi juga sampai pengurusan perijinan. Bahkan tidak jarang ada calo yang mau meminjamkan uang untuk biaya pendaftaran dan biaya-biaya lainnya sehingga acapkali membuat calon migran masuk dalam perangkap hutang (*debt bondage*). Umumnya para calon pekerja migran perempuan ini tidak mengetahui secara pasti alokasi biaya yang mereka serahkan kepada calo atau pun PJTKI.⁸

Setelah mendaftar di PJTKI, calon migran langsung ditempatkan di penampungan yang juga menjadi tempat pendidikan dan latihan sebelum diberangkatkan. Di tempat penampungan ini, calon migran perempuan seperti 'disekap', dilarang keluar tempat penampungan dan tidak boleh melakukan kontak dengan keluarga atau kerabatnya. Kondisi penampungan acapkali kurang memadai fasilitasnya. Harian *Kompas* tanggal 21 Desember 2002 melaporkan sekitar 1000 calon TKW 'disekap' dalam sebuah ruangan berukuran kira-kira 20 x 20 meter dengan tinggi 6 meter. Di dalamnya terdapat tempat tidur memanjang bertingkat empat dengan lebar 1,5 meter yang tentu saja tidak memadai untuk menampung calon TKW sebanyak itu. Menurut para calon TKW, pendidikan dan latihan yang diberikan juga dirasakan kurang mendalam karena hanya singkat saja. Masa menunggu pemberangkatan pun tidak jelas, ada yang kurang dari 1 bulan dan ada pula yang lebih dari 6 bulan.

Dalam proses-proses berikutnya – pembuatan paspor, dokumen kontrak kerja, jadwal pemberangkatan – calon pekerja migran sering



Foto: anti-slaverysociety

tidak mengetahui apakah terjadi pemalsuan atau tidak dan tidak juga mengetahui apakah isi kontrak kerja tersebut yang menyangkut gaji, waktu kerja, jenis pekerjaan, cuti dan lain-lain. Paspor baru diberikan saat mereka akan berangkat, namun ketika sampai di negara tujuan paspor harus diserahkan kembali kepada agensi setempat atau ke majikannya. Paspor baru diberikan kembali ketika pekerja migran akan pulang kembali ke Indonesia.

Persoalan yang lebih serius dialami oleh pekerja migran perempuan ketika mereka telah mulai bekerja sebagai PRT di negara tujuan. Menjadi PRT berarti pekerja migran bekerja sendiri dalam sebuah ruang privat rumah tangga yang sulit dikontrol situasi dan kondisinya. Apalagi negara-negara yang menjadi tujuan pekerja migran perempuan Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki budaya patriarkhi yang kuat seperti negara-negara Timur Tengah, Singapura, Taiwan, Hongkong, atau Malaysia. Oleh karenanya, apabila PRT mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan – fisik, psikis, dan seksual – di tempat kerjanya tidak mudah diketahui oleh pihak lain, termasuk tetangga terdekatnya. Jam kerja yang panjang, tak ada waktu istirahat, larangan ke luar rumah, tidak boleh mengobrol dengan sesama TKI di lingkungan kerja, dan gaji tidak diberikan adalah bentuk-bentuk perlakuan yang sering dialami PRT.

Data-data yang dilaporkan oleh Solidaritas Perempuan selama tahun 2001 terdapat 101 pengaduan dengan 121 jenis kasus pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 89,7% diantaranya adalah kasus pelanggaran terhadap buruh migran perempuan dan 6,8% adalah kasus yang dialami oleh buruh migran laki-laki. Pada tahap sebelum pemberangkatan (*pre-departure*), ditemukan kasus buruh migran yang mengalami persoalan pemalsuan identitas yang cukup tinggi, yakni sebesar 21% dan pemerasan juga sebesar 21%, sedangkan pada tahap kedatangan (*post arrival*), persoalan gaji tidak dibayar menempati urutan tertinggi, yakni 37%, penganiayaan 14% dan percobaan perkosaan sekitar 20% dari 121 kasus yang masuk.⁹

Bagi para pekerja migran perempuan yang tak berdokumen, kerentanan terhadap diskriminasi dan kekerasan biasanya lebih besar. Pengalaman berikut menggambarkan bagaimana rentannya seorang migran perempuan tak berdokumen yang bekerja sebagai PRT.

SS (21 tahun) berasal dari Ciamis yang mencoba merantau ke Bandung lalu bekerja di pabrik konveksi pada tahun 1990. Ia kemudian mendapatkan informasi tentang Ibu M, tetangganya, yang pernah bekerja di Malaysia dan mendapatkan gaji besar. SS kemudian mengutarakan keinginannya kepada Ibu M untuk pergi ke Malaysia. Awalnya ia dibujuk untuk mengurungkan niatnya karena Ibu M bekerja di Malaysia secara tidak resmi dan risikonya tinggi. SS mendesak terus, akhirnya ia bersama 3 orang lainnya dibawa ibu M ke sponsor atau calo A di Cilacap. SS diminta membayar Rp. 150.000 tetapi ia hanya memberikan Rp. 50.000, sehingga ia sepakat untuk memotong dari gajinya selama 4 bulan pertama. Pada tanggal 21 Desember 1991, SS berangkat ke Malaysia.

Pertama-tama SS bekerja sebagai pembantu di salon selama 6 bulan. Selanjutnya ia dipindahkan ke pabrik roti dan bertahan hingga 2 tahun. Ia bekerja dari jam 6.00 hingga jam 23.00. Selama bekerja SS menerima gaji 250 ringgit/bulan. Majikannya, YN dan istrinya JN, sering berlaku kasar dan tidak memperhatikan kesehatannya. SS disuruh bekerja membantu membuat roti dan mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga.

SS tidur di lantai atas bersama As, anak laki-laki majikannya. Awalnya ia ketakutan, dan akhirnya ketakutan itu menjadi kenyataan. Ia dipaksa melayani nafsu As dan terpaksa hidup seperti suami istri. Suatu ketika ia pernah diseret As dari lantai atas ke bawah sampai pingsan, dipukuli, atau digigit payudaranya. Akhirnya SS hamil, tetapi ia tetap disuruh bekerja. Setelah melahirkan ia dilarang menyusui bayinya bahkan disuruh pulang ke Indonesia.

Ketika di pesawat SS tampak seperti orang bingung, penuh rasa takut dan linglung. Di leher SS tampak tanda bekas suntikan. Menurutny ia disuntik oleh seorang dokter ketika akan pulang. Ia datang dengan membawa tas berisi barang-barang ala kadarnya. SS sulit diajak bicara untuk digali ingatannya. Saat ini keadaannya membaik, dan sudah bisa melakukan kontak dengan lingkungannya. Hanya sesekali ia tampak 'out of context'.¹⁰

Kasus di atas hanyalah sebuah contoh bagaimana pekerja migran perempuan rentan terhadap kekerasan seksual yang jelas-jelas berbasis gender. Mulai dari ancaman perkosaan, pelecehan seksual (diintip ketika sedang tidur, dicium atau diraba tubuhnya saat bekerja, diimingi uang agar mau melayani majikan dan lain-lain) sampai perkosaan. Konsekuensi dari kekerasan seksual yang dialami pekerja migran perempuan dapat bermuara pada keluar atau minggat atau diusir dari tempat kerja, mengadu ke agensi atau kedutaan besar, kehamilan tak dikehendaki, atau bahkan kematian.

Isu-isu Seksualitas dalam Migrasi Lintas Batas Negara

Dalam beberapa tahun terakhir ini, persoalan migrasi lintas batas negara di Asia Tenggara bukan lagi terbatas pada migran yang secara sukarela mencari pekerjaan, tetapi berkembang ke arah perdagangan manusia (*human trafficking*). Perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak ini mengandung unsur-unsur paksaan (*forced*), penipuan, jeratan hutang (*debt bondage*) atau bentuk kekerasan lainnya. Isu perdagangan perempuan dan anak ini tidak terbatas pada prostitusi, tetapi juga peredaran narkoba, perburuhan, anak yang dilacurkan, perdagangan bayi dan organ tubuh.¹¹ Berikut ini akan diulas beberapa masalah eksploitasi seksualitas perempuan – berdasarkan pengalaman Indonesia – yang terkait dengan migrasi lintas batas negara di Asia Tenggara.

1. Kawin Kontrak

Di Malaysia, mekanisme kawin kontrak¹² sering diberlakukan terhadap pekerja migran yang bekerja sebagai PRT untuk menghindari pembayaran pajak (*levy*). Adanya aturan yang membebaskan pembayaran pajak apabila pekerja migran menikah dengan orang Malaysia digunakan sebagai alasan untuk mengancam atau menakuti PRT yang tak berdokumen. Melalui mekanisme kawin kontrak ini maka para PRT harus mau dibayar murah dan siap bekerja dalam kondisi *dirty, dark, dangerous*.¹³ Fenomena ini banyak terjadi di wilayah Malaysia Timur yaitu Sabah dan Sarawak.

Fenomena kawin kontrak jelas berimplikasi terhadap seksualitas dan kesehatan reproduksi pekerja migran perempuan. Pusat-pusat pelayanan kesehatan di Malaysia tidak mau melayani migran tak

berdokumen. Apabila terjadi kehamilan – yang hampir pasti kehamilan yang tak dikehendaki – maka migran perempuan Indonesia terpaksa datang ke pelayanan kesehatan yang tidak dijamin standar kesehatannya ataupun ke pelayanan kesehatan tradisional. Masalah kesehatan reproduksi menjadi lebih serius apabila ingin dilakukan aborsi terhadap kehamilan yang dialami.

2. Prostitusi dan *Sex Tourism* (Wisata Seks)

Di Thailand, prostitusi dan pariwisata dianggap dua hal yang tidak terpisahkan. Fenomena perdagangan anak dan perempuan sebagaimana dilaporkan majalah *Time* (4 Februari 2003) memperlihatkan bagaimana industri seks Thailand menjadi sasaran dari perdagangan tersebut. Pada tahun 1993, diperkirakan 20.000 perempuan Burma terlibat dalam pelacuran di Thailand dan setiap tahunnya direkrut 10.000 anak dan perempuan lainnya.¹⁴

Keterkaitan antara pelacuran dan wisata seks juga terlihat di Batam, Tanjung Balai Karimun dan pulau-pulau wisata di Kepulauan Riau. Sindikat terorganisir membawa remaja perempuan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk dipekerjakan di bar-bar, diskotik, karaoke, klab malam atau panti pijat yang pada akhir pekan banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Di Malaysia Timur, cukup banyak migran perempuan Indonesia yang ditipu dan dipaksa menjadi pekerja seks. Peningkatan prostitusi anak perempuan di wilayah perbatasan tersebut terkait dengan mitos seksual seputar HIV/AIDS yaitu berhubungan seks dengan anak-anak lebih aman karena risiko tertular HIV/AIDS lebih kecil.

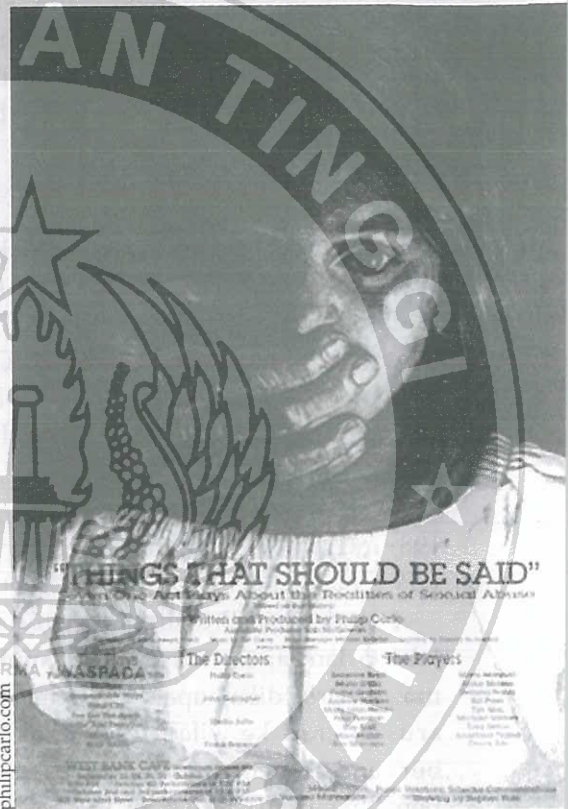
Data BPS tahun 2000 mencatat 4.574 perempuan pencari kerja di Pulau Batam dan 26,6% di antaranya adalah anak perempuan usia 15-19 tahun. Mereka merupakan kelompok yang terjerat kegiatan trafficking termasuk eksploitasi seksual komersial. Perempuan dan anak perempuan yang bekerja di prostitusi terselubung biasanya terikat kontrak kerja, ditempatkan di penampungan tertentu dengan kondisi kerja yang berciri '*bonded*' yaitu disekap dan dilarang keluar dari tempat kerja tanpa ijin pengawas atau *mami*. Mereka juga seringkali terperangkap jeratan hutang sejak masih berada di daerah asalnya. Rendahnya tingkat pendidikan para migran perempuan menyebabkan mereka tidak memiliki

pengetahuan tentang hak asasi manusia, hak perempuan, hak kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Dengan kata lain, akses terhadap informasi yang benar dan memadai tidak dimiliki migran perempuan. Tidaklah mengherankan apabila risiko terpapar PMS dan HIV/AIDS menjadi tinggi.

Anak-anak yang diperdagangkan tidak melulu untuk prostitusi, tetapi juga untuk bidang pekerjaan lainnya seperti buruh bangunan, buruh pabrik dan industri perikanan. Di Thailand, jumlah pekerja anak laki-laki dari Burma yang masuk secara ilegal lebih besar daripada pekerja anak perempuan, dengan rasio 71:29.¹⁵ Banyak dari mereka disebar ke jalan-jalan di Bangkok untuk mengemis dan bisa mendapatkan 300 sampai 1000 *baht* sehari yang beberapa kali lipat dari upah harian di negara asalnya.¹⁶

3. Perubahan Perilaku Seksual

Beberapa kajian migrasi memperlihatkan bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan untuk mengubah perilaku seksualnya seiring dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berada jauh dari keluarga dan komunitas asalnya – berarti melemahnya kontrol sosial – mengakibatkan para migran merasa ‘terbebas’ dari norma-norma budaya yang mengatur seksualitas mereka selama ini. Informasi sementara yang kami terima, ada sejumlah PRT asal Indonesia yang telah berkeluarga ketika bekerja di Singapura menjalin hubungan intim dengan pekerja konstruksi asal Bangladesh atau negara lain. Apabila terjadi kehamilan, maka mereka melakukan aborsi dengan cara-cara tradisional.



Dalam konteks ini mencermati perilaku seksual migran laki-laki sangat penting karena mobilitas mereka tinggi, kondisi tempat kerja, peran gender yang lebih bebas daripada perempuan dan norma maskulinitas yang dimiliki. Studi tentang pekerja migran di Lombok memperlihatkan bahwa kondisi tempat kerja dan tempat tinggal di perkebunan yang kurang layak menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Untuk mengatasinya mereka mencari hiburan ke kota termasuk ke tempat pelacuran.¹⁷

4. Penyebaran HIV/AIDS

Daerah-daerah perbatasan di Mekong berkembang menjadi daerah konsentrasi penyebaran HIV. Kota Chiang Rai diduga memiliki laju infeksi HIV dan AIDS tertinggi di Thailand: kota Ruili di perbatasan Yunnan memiliki insiden HIV/AIDS tertinggi di Cina: Manipur di perbatasan utara Myanmar-India, lebih dari separuh dilaporkan sebagai HIV positif.¹⁸ Di Myanmar epidemi HIV banyak terjadi karena transmisi non-seksual. Tingkat infeksi HIV di antara pengguna narkoba suntik merupakan yang tertinggi di dunia, melompat dari 54,5% pada tahun 1989 menjadi 74,3% pada tahun 1992.¹⁹ Sementara di Thailand transmisi HIV terjadi lebih banyak karena hubungan heteroseksual.

Di Indonesia, Provinsi Riau tercatat sebagai provinsi ketiga – setelah Jakarta dan Papua – terbanyak ditemukannya kasus HIV/AIDS. Meskipun masih perlu dikaji apakah fenomena ini berkaitan dengan tingginya arus migrasi ke wilayah tersebut, terutama Kepulauan Riau yang berkembang menjadi pusat industri dan pariwisata. Sementara penyebaran HIV/AIDS di Papua saat ini semakin mengkhawatirkan sejalan dengan semakin tingginya mobilitas penduduk – lokal, pendatang, maupun asing – dari dan ke Papua yang saling menjalin perilaku seksual penduduk lokal, kondisi sosial ekonomi dan masuknya industri yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Kajian-kajian tentang penyebaran PMS dan HIV/AIDS serta mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Asia Tenggara kepulauan (Indonesia, Filipina, Malaysia) masih amat terbatas bila dibandingkan dengan kajian-kajian serupa di daerah Mekong. Beberapa kajian yang dilakukan di Indonesia lebih memfokuskan dampak migrasi antar negara terhadap daerah asal migran dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.²⁰

Diskusi dan Rekomendasi

Diskriminasi dan kekerasan seksual yang dialami oleh para migran perempuan Indonesia – dalam bentuk kawin kontrak, pelecehan seksual, perkosaan, paksaan untuk menjadi pekerja seks – memperlihatkan bahwa seksualitas tidaklah semata-mata persoalan dorongan seksual biologis, tetapi lebih merupakan persoalan relasi kekuasaan berbasis gender. Di dalamnya mengandung unsur dominasi dan perendahan martabat perempuan. Mengingat martabat perempuan selalu dikaitkan dengan seksualitasnya, maka kekerasan seksual terhadap tubuh perempuan berarti pula mengoyak martabat dan harga diri perempuan sebagai individu maupun sebagai anggota suatu komunitas atau kelompok.

Dalam banyak masyarakat, secara budaya tubuh perempuan bukanlah sesuatu yang dimiliki perempuan secara otonom. Kehormatan perempuan berarti juga kehormatan ayah, suami, komunitas dan negara.²¹ Melecehkan atau memperkosa perempuan merupakan cara yang strategis untuk merobek harga diri laki-laki dan juga kolektif bahkan negara. Tubuh perempuan menjadi simbol penegasan batas-batas (*boundaries*) antar kelompok, ras, etnis atau pun agama yang berbeda. Dalam perspektif ini menjadi penting untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap migran perempuan Indonesia sebagai isu seksualitas.

Perhatian dan kajian yang lebih serius perlu dilakukan terhadap perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi yang dikaitkan dengan penyebaran PMS dan HIV/AIDS. Persoalan prostitusi memang selalu kontroversial dan banyak negara yang melihat prostitusi sebagai kegiatan “menjajakan seks” yang dilarang tetapi tidak melarang kegiatan “membeli seks” yang diajakan tersebut. Kebijakan seperti ini membuat upaya mengatasi prostitusi tidak efektif dan jelas mempunyai implikasi yang luas terhadap epidemi HIV/AIDS. Pengalaman di wilayah Mekong memperlihatkan bahwa selama ini fokus lebih ditujukan pada kelompok-kelompok migran yang melintasi batas negara untuk mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa penduduk yang berpindah dalam jangka pendek (*short-term movers*) di sepanjang perbatasan jumlahnya lebih banyak daripada penduduk yang dikategorikan sebagai migran tersebut dan kelompok ini sering diabaikan dalam analisis.²²

Apabila migran perempuan Indonesia diperdagangkan untuk

menjadi pekerja seks di Sabah dan Serawak maka harus dicermati bahwa kliennya tidak terbatas pada warga Malaysia tetapi juga pelintas batas Indonesia yang rutin melakukan kegiatan di wilayah perbatasan. Demikian juga pekerja seks perempuan dan anak di Batam dan Kepulauan Riau yang disinyalir untuk memenuhi kebutuhan seksual wisatawan Singapura dan Malaysia yang datang pada setiap akhir pekan. Namun tidak diperhatikan klien-klien yang berasal dari wilayah setempat yang mobilitasnya cukup tinggi, apalagi mengingat Batam dan sekitarnya merupakan pusat industri yang berkembang pesat. Mengubah kebijakan yang lebih mengontrol aktivitas membeli pelayanan seksual merupakan salah satu alternatif dekriminalisasi prostitusi. Dengan demikian, fokus akan lebih diarahkan pada kontrol perilaku seksual kelompok klien daripada melulu kepada pekerja seks.

Melihat fenomena kawin kontrak dalam konteks perdagangan perempuan juga perlu dicermati bahwa hal tersebut tidak semata-mata terjadi antara warga dari dua negara yang bertetangga, tetapi juga antara warga dari negara yang sama. Wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura yang lebih makmur selalu menjadi magnet bagi penduduk dari daerah lain di Indonesia untuk datang karena bagaimanapun wilayah perbatasan memberikan lebih banyak peluang ketimbang kampung halamannya. Pulau Batam dan sekitarnya merupakan contoh yang jelas. Dengan demikian, kawin kontrak tidak hanya terjadi antara PRT Indonesia dengan majikannya dengan alasan menghindari pajak, tetapi juga migran perempuan lainnya dengan pekerja asing (Taiwan atau Hongkong misalnya) atau migran perempuan dengan pekerja Indonesia yang bermigrasi ke wilayah perbatasan. Mencermati fenomena ini secara komprehensif akan bermanfaat untuk lebih memahami persoalan migrasi lintas batas dan menemukan cara-cara penanganannya yang efektif.

Catatan Belakang

- 1 R. Tirtosudarmo, "Migrasi Lintas Batas Negara: Posisi Indonesia, Konteks Politik dan Perebutan Ruang Publik", makalah pada *Lokakarya Nasional Migrasi Lintas Batas Negara dan Seksualitas*, Yogyakarta, 27 Maret 2002.
- 2 Bangkok Post, 8 Desember 1996.
- 3 A. Amarapibal dan S. Chantanavich, "Labor Crossing into Ranong: A New Chapter

- in the Problem of Globalization”, *Krungthep-Thurakij Daily*, 28 September 1995.
- ⁴ Bangkok Post, 18 Desember 1996.
- ⁵ H. Berliani, **Perilaku Seksual Pekerja Migran** (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999).
- ⁶ W. Susilo, “Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia”, *Jurnal Perempuan* edisi 26, hal. 51-52 dan R. Tagaroa dan E. Sofia, **Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan** (Bekasi: Solidaritas Perempuan dan Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, 2002) hal. 1.
- ⁷ <http://www.nakertrans.go.id>.
- ⁸ Tagaroa, *op.cit.*
- ⁹ <http://www.december18.net>.
- ¹⁰ Tagaroa, *op.cit.*, hal.133-136.
- ¹¹ W. Susilo, *op.cit.*, hal. 55.
- ¹² Fenomena yang hampir mirip terjadi di wilayah Mekong dimana perempuan-perempuan Vietnam dan Burma diperdagangkan ke Cina Selatan untuk dijadikan mepelai perempuan bagi laki-laki Cina. Lihat P. Marshall, “Globalization, Migration and Trafficking: Some Thoughts from the South-East Asian Region” *Occasional paper no. 1. UN Inter-Agency Project on Trafficking in Women and Children in the Mekong Sub-region*. 2001.
- ¹³ W. Susilo, *op.cit.*, hal. 57-58.
- ¹⁴ D. Porter, *A Plague on the borders: HIV, Development and Traveling Identities in the Golden Triangle* dalam L. Manderson dan M. Jolly (eds.), **Sites of Desire, Economics of Pleasure** (Chicago: The University of Chicago Press, 1997) hal. 221.
- ¹⁵ V. Chandra, “The Economic Crisis and its Impact on Cross-border Migration in the Mekong Region” 1998, makalah yang tidak diterbitkan.
- ¹⁶ P. Marshall, *op.cit.*
- ¹⁷ H. Berliani, **Perilaku Seksual Pekerja Migran** (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999).
- ¹⁸ K. Hartwig, “Bridging Borders in Southeast Asia: The Politics of HIV Prevention for Women”, *AIDS Scaptions* vol. II, no. 3, 1996 dan Porter, *op.cit.*, hal. 212-213.
- ¹⁹ Porter, *op.cit.*, hal. 219.
- ²⁰ A. Haris, **Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Setiadi, “Konteks Sosio Kultural Migrasi Internasional: Kasus di Lewotolok, Flores Timur”, *Populasi*, vol. 10, no. 2, 1999 hal. 17-38, W. Tamtari, “Dampak Sosial Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia”, *Populasi*, vol. 10, no. 2, 1999 hal. 39-56 dan Triantoro, *op.cit.*
- ²¹ Ahmad 1992 dalam S.R. Dzuhayatin, “Perkosaan dan Mekanisme Kolonialiasi Gender”, *Populasi*, vol. 12. no. 1, hal. 71-88. 2001.
- ²² R. Skeldon, *Population Mobility and HIV Vulnerability in South East Asia: An Assessment and Analysis*, UNDP 2000.





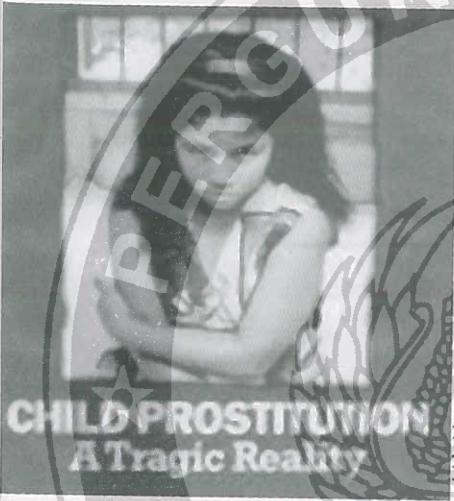
Perbudakan Kontemporer

Menurut *Fact Sheet No.14, Contemporary Forms of Slavery*, yang dikeluarkan oleh UNHCR (*United Nation High Commission for Human Rights*), dinyatakan bahwa perbudakan adalah isu HAM pertama yang muncul dan menjadi keprihatinan seluruh bagian masyarakat dunia. Meskipun telah menghadapi berbagai bentuk kutukan dari seluruh penjuru dunia, pada kenyataannya bentuk-bentuk perbudakan ini masih saja terjadi hingga di penghujung abad ini.

Istilah perbudakan di zaman sekarang mencakup berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berbeda dibandingkan dengan perbudakan pada awal-awal kelahirannya. Saat ini perbudakan mencakup berbagai

jenis tindakan seperti: penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, eksploitasi anak dalam mencari nafkah, mutilasi organ seksual anak perempuan, penggunaan anak dalam konflik bersenjata, jeratan hutang (*debt bondage*), perdagangan manusia dan perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi PSK, dan beberapa tindakan lain di bawah tekanan rezim apartheid atau penjajahan.

Praktek-praktek menyerupai perbudakan berlangsung secara terselubung. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang skala nyata praktek perbudakan. Padahal gambaran nyata ini sangat diperlukan untuk kepentingan pengungkapan, penghukuman, dan upaya penghapusannya. Masalah yang membuatnya semakin runyam adalah fakta bahwa kebanyakan korban perbudakan berasal dari kelompok masyarakat paling miskin dan paling rentan.



Beberapa Aspek dalam Perbudakan

- Pekerja anak

Kebutuhan akan pekerja anak sangat tinggi karena harganya yang murah, patuh, dan lebih mudah diatur daripada anak dewasa, dan tidak cukup nyali untuk melakukan protes. Fisik mereka yang kecil dan jari mereka yang cekatan merupakan aset bagi majikan yang jahat untuk mempekerjakan mereka dalam berbagai jenis pekerjaan. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), sebagai contoh, bukan hanya harus bekerja untuk jam kerja yang panjang tapi mereka juga rentan mengalami kekerasan seksual dan fisik lainnya.

- Perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata

Prekrutan secara paksa pada anak-anak untuk kepentingan militer telah terjadi di banyak bagian dunia. Konsekuensinya sangat parah. Banyak di antara mereka yang harus meninggal atau cacat dalam peperangan, sementara yang lainnya diinterogasi, disiksa, dipukuli, atau dipenjarakan sebagai tahanan perang.

- *Perdagangan manusia, eksploitasi seksual*

Rekrutmen, pemindahan yang sembunyi-sembunyi, dan eksploitasi perempuan sebagai pekerja seks, dan pelacuran anak baik laki-laki maupun perempuan, di berbagai negara telah terdokumentasikan. Di beberapa tempat terdapat jalinan yang sangat kuat antara prostitusi dan pornografi yang melibatkan anak-anak untuk kepentingan pertumbuhan wisata seks.

- *Penjualan anak*

Berbagai bentuk kejahatan lain yang secara ekonomi sangat menguntungkan juga telah ditemukan. Salah satu diantaranya adalah perpindahan anak dari keluarga yang tidak mampu ke keluarga lain yang lebih mampu tanpa mengawasi apakah perpindahan tersebut telah mengindahkan kepentingan anak atau tidak. Dalam banyak kasus, keuntungan yang diperoleh orang tua maupun calo bisa dimasukkan dalam kategori perdagangan anak.

- *Jeratan hutang (debt bondage)*

Jeratan hutang dapat dengan jelas dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari perbudakan tradisional. Jeratan hutang akan mencegah korban untuk melarikan diri pekerjaan atau tempatnya bekerja sampai hutangnya tersebut terbayar lunas. Meskipun secara teori hutang itu dapat terbayarkan untuk jangka waktu tertentu, akan tetapi jeratan itu akan terus ditingkatkan hingga si peminjam benar-benar tak dapat melunasinya. Bagi hasil adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk menjerat peminjam dalam jeratan hutang.

Industrialisasi Seks

Industri pornografi termasuk sektor yang paling pesat pertumbuhannya di dunia. Sebuah survei memperkirakan penduduk Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan \$8-10 milyar untuk mendapat majalah, kaset video, atau akses ke siaran dan situs internet porno. Peredaran majalah seperti *Hustler*, *Penthouse* dan *Playboy* setiap tahunnya mencapai 200 juta eksemplar, melebihi peredaran majalah berita terkenal seperti *Time* dan *Newsweek*. Keuntungan di sektor ini berlipat-lipat karena biaya produksi biasanya sangat rendah. Modal yang diperlukan untuk sebuah film porno misalnya berkisar antara \$20.000 sampai \$125.000 sementara pendapatannya bisa mencapai \$2 juta. Para pemain biasanya dibayar sangat murah karena dianggap murahan dan tidak bermutu. Mereka

hidup terikat dalam kontrak dan juga lingkungan yang penuh kekerasan dan obat bius.

Sebuah survei oleh majalah *Women's Day* mengatakan 21% dari 6.000 pembacanya pernah mengalami serangan atau pelecehan seksual sebagai akibat langsung dari konsumsi pornografi. Studi lain mengatakan tontonan pornografi cenderung membuat laki-laki menjadi lebih agresif terhadap perempuan. Sebaliknya kekerasan seksual juga cenderung mendorong perempuan untuk terlibat dalam industri pornografi. Sekitar 70% perempuan dalam industri ini pernah mengalami serangan seksual atau menjadi korban *incest* (perkosaan oleh anggota keluarga/saudara) semasa kecil.

Dalam beberapa tahun belakangan kecenderungan melibatkan anak-anak dalam industri ini pun semakin besar untuk melayani konsumen pedofilia yang juga semakin meningkat. Sekarang ini sekitar 7% industri pornografi di Amerika Serikat menjual anak-anak berusia 10-15 tahun yang berhubungan sesama mereka atau dengan orang dewasa. Majalah *Hustler* misalnya rata-rata menampilkan gambar anak sebanyak 14 kali dalam tiap edisinya. Banyak tafsir yang mencoba menjelaskan berkembang pesatnya industri pornografi dalam dunia modern. Tapi agaknya alasan utama adalah \$40 milyar yang dihasilkan industri ini setiap tahunnya dan perlindungan tidak langsung dari penguasa yang mendapat bagian dari jumlah itu.

Jenis-jenis Trauma Perempuan Korban Perdagangan

Korban-korban perdagangan perempuan biasanya mengalami trauma akibat kejadian-kejadian yang telah mereka lalui. Berbagai tindakan pemaksaan, pengekangan, dan penyiksaan yang selama ini mereka hadapi tentu saja mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi perkembangan psikologi mereka. Apalagi hal itu harus mereka hadapi di tempat-tempat yang jauh dari akar sosial dan keluarga yang selama ini memberikan rasa aman bagi dirinya. Trauma yang dirasakan korban perdagangan perempuan mengacu pada pengalaman-pengalaman mengagetkan dan menyakitkan. Trauma lebih dari sekadar perasaan *stress* atau tertekan yang sering kita alami sehari-hari. Di balik trauma pasti ada peristiwa atau serangkaian peristiwa yang sangat menekan, terjadi secara tiba-tiba, di luar kendali korban, menghinakan martabat dan harkat diri korban, dan sekaligus mengancam jiwa atau kehidupan dirinya.

Bisa dipastikan, korban perdagangan perempuan menjalani serangkaian peristiwa traumatis.

Pada saat perekrutan:

1. Sebagian korban telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat pemukulan yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga lainnya. Korban juga mungkin terguncang ketika mengetahui suami, atau pacarnya mengkhianati dirinya. Kekerasan-kekerasan inilah yang menjadi penyebab perempuan lari dari rumah.
2. Perempuan korban tiba-tiba harus dibawa jauh pada suatu tempat yang tidak ia ketahui, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mereka kenali, dan disekap dalam sebuah tempat yang terisolasi.
3. Mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa setelah calo atau agen yang biasanya adalah orang dekat bahkan keluarganya sendiri, ternyata menelantarkan dan menjerumuskan dirinya.

Pada saat pemindahan atau pengiriman:

1. Biasanya mereka diangkut oleh alat transportasi yang jauh dari nyaman. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pada waktu yang tidak lazim (tengah malam atau menjelang fajar), dan melalui perjalanan (darat atau laut) yang sangat berat.
2. Seringkali selama perjalanan mereka tidak diberi makanan, obat, atau kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, apalagi yang menyangkut dengan kepentingan reproduksi perempuan.
3. Selama perjalanan mereka biasanya dilarang berkomunikasi satu sama lain. Di antara mereka diciptakan suasana saling curiga dan tidak percaya. Mereka juga dilarang berkomunikasi dengan orang luar yang tidak mereka kenali.

Pada saat penempatan/bekerja:

1. Mereka kehilangan harga dirinya karena harus menjalani perkosaan demi perkosaan.
2. Tidak jarang mereka harus berhadapan dengan tamu yang gemar memukuli, memiliki gangguan kejiwaan seksual, atau memiliki penyakit-penyakit kelamin (HIV atau sifilis) yang dapat menulari bahkan membahayakan hidup dirinya.
3. Mereka menemukan dirinya dalam keadaan terjatuh hutang yang sangat banyak. Mereka terpaksa harus mengorbankan tubuhnya

- dieksploitasi untuk membayar hutang.
4. Mereka juga harus berhadapan dengan tukang pukul atau *centeng* yang tak segan menyiksa jika diketahui memiliki niat untuk melarikan diri.
 5. Tak ada lagi orang yang dapat mereka percaya. Terutama ketika mereka mengetahui aparat negara atau penegak hukum yang seharusnya melindungi dirinya ternyata telah menjadi bagian dari kejahatan.

Pada saat pemulangan:

1. Mereka mengalami ketidakpastian nasib. Mereka sangat khawatir dengan keselamatan dirinya. Bahkan pada saat pemulangan –akibat ketidaktahuan- mereka kembali terjebak oleh calo-calo dan menjadi korban untuk kesekian kalinya. Jika hal ini terjadi maka trauma yang dirasakan korban akan semakin berat.
2. Jika pun mereka sampai di tempat asalnya, mereka menghadapi stigma masyarakat sebagai “pelacur” atau “manusia kotor”. Tak jarang masyarakat sering mengusir korban perdagangan perempuan yang telah terkena stigma ini karena dinilai hanya akan mencoreng nama baik desa atau kampung.

Pemulihan Trauma

Respon terhadap berbagai rentetan kejadian traumatis yang telah mereka lalui sangat beragam. Sangat wajar jika setelah kejadian traumatis mereka mengalami hal-hal seperti bayangan trauma, merasa kejadian seperti berulang (*flashback*), ketakutan kembali dalam bahaya, dan kesulitan mengendalikan emosi. Respon atas trauma seperti yang ditunjukkan tadi disebut oleh para psikolog sebagai *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*. PTSD adalah sebuah gejala pasca kejadian traumatik yang dapat mengancam kehidupan yang berakibat pada tekanan psikologis yang merusak integritas dan eksistensi dirinya atau orang lain.

Menyembuhkan seorang penderita luka kejiwaan memang amat sulit. Menurut Judith Herman, psikolog feminis yang menulis buku *Trauma and Recovery*, berbeda dengan luka fisik yang dapat disembuhkan tanpa keikutsertaan aktif penderitanya, penyembuhan luka kejiwaan harus melibatkan penderitanya secara aktif. Judith mengingatkan, prinsip

utama dalam penyembuhan trauma adalah memberdayakan korban. Biarkan korban (*survivor*) menjadi pemrakarsa pemulihan. Menurutnya adalah hal sia-sia bila ada “orang luar” memiliki target untuk memulihkan trauma, apalagi jika proses itu ditempuh melalui hubungan subjek-objek. Usaha pemulihan korban merupakan kerja berdasarkan cinta yang dibangun berlandaskan komitmen kedua belah pihak. Komitmen ini yang akan melahirkan “kontrak” antara korban dan pendamping. “Kontrak” dalam hal ini diartikan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga hubungan kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama. Pendamping menjamin kerahasiaan, sementara korban juga harus setuju untuk membuka dirinya. Pendamping berjanji untuk selalu mendengar apapun cerita korban sementara korban juga berjanji untuk selalu memberikan keterangan yang benar. Empati menjadi kata kunci di sini. Empati akan membuat korban merasa nyaman dan tidak curiga bahwa kita akan mengeksploitasi penderitaannya.

Peran Komunitas dalam Pemulihan Korban

Berbagi pengalaman traumatik dengan orang lain adalah salah satu pra kondisi bagi pengembalian kepercayaan terhadap dunia luar. Dalam proses ini korban akan mencari bantuan bukan hanya orang-orang terdekatnya (keluarga, teman, atau pendamping), tapi juga dari masyarakat secara luas. Di sinilah letak penting peran masyarakat untuk turut memulihkan kepercayaan diri korban sekaligus mendapatkan kembali perasaan aman dan terlindungi. Peran komunitas ini biasanya akan melalui dua tahap, *pertama*, melalui pengetahuan publik (*recognition*) terhadap kejadian traumatik yang dialami korban atau biasa disebut dengan *public acknowledge*. Perhatian besar publik terhadap pengalaman korban perdagangan perempuan akan membuat yang bersangkutan merasa bahwa dirinya mendapatkan simpati atau dukungan masyarakat. Setidaknya, masyarakat mengetahui ada seseorang yang mengalami penderitaan. Dalam kasus seperti Nirmala Bonat misalnya, eksposur media yang besar-besaran telah membuka kacamata masyarakat bahwa banyak sekali pekerja migran perempuan yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikologis. Hal ini akan mengundang respon masyarakat untuk melakukan peran mereka yang *kedua*, yaitu melakukan tindakan-tindakan baik yang bersifat politis maupun praktis untuk memulihkan korban. Peran kedua ini biasa

disebut dengan peran *restitution* (pengembalian atau pemulihan). Kedua peran ini dapat dilakukan oleh masyarakat jika terdapat hubungan yang baik antara korban, pendamping, dan media. Media dapat membantu dengan menghubungkan informasi antara korban dengan masyarakat, pejabat atau badan yang berwenang. Diakui peran media sangat besar dalam membentuk opini publik sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan nyata. Media dan masyarakat dapat bersama-sama melakukan penggalangan dana untuk membantu memulihkan korban. Pola ini sebenarnya dapat dikembangkan mengingat hampir semua media di Indonesia memiliki instrumen untuk penggalangan dana publik. Hanya saja persoalan perdagangan manusia masih belum dianggap sebuah hal yang perlu perhatian khusus. (MBW)

(Sumber: *Fact Sheet No.14, Contemporary Forms of Slavery*, UNHCR (United Nation High Commission for Human Rights), *Media Kerjabudaya Online, Sex Slave, The Trafficking of Women in Asia* karya Louise Brown, *Trauma and Recovery* karya Judith Herman, *Menata Hidup Setelah Trauma Panduan Bagi Korban dan Pendamping* keluaran Yayasan Pulih-ICMC-USAID, dan *Jurnal Perempuan No.24*)

YAYASAN

YJP

JURNAL
PEREMPUAN

BHAKTI - DHARMA - KASAPADA

Mengundang anda penerbit buku-buku
berperspektif gender untuk bergabung

menjadi

Toko Buku "Perempuan"

Alamat:

Jl. Tebet Barat VIII No. 27 Jakarta Selatan 12810

Phone (021) 8370 2005 (Hunting)

Fax (021) 8302434

e-mail : yjp@yjp.or.id

Hubungi:

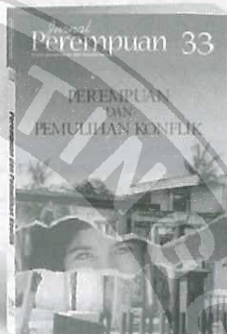
Suprihadi (priadi@yjp.or.id)

Nazar (nazar@yjp.or.id)

(Bagian Pemasaran)

Ikuti terus isu-isu perempuan lewat edisi-edisi Jurnal Perempuan berikut:

Berbincang tentang perempuan di wilayah yang dipulihkan (*recovered*) berarti bicara tentang pemulihan akibat trauma dan kekerasan. Maka diperlukan rekomendasi untuk tidak melupakan segala masalah dan kondisi yang menghimpit perempuan akibat konflik



PEREMPUAN DAN PEMULIHAN KONFLIK

POLITIK dan KETERWAKILAN PEREMPUAN

Jurnal Perempuan
untuk pencerahan dan keadilan



Bagi perjalanan gerakan perempuan di Indonesia, Pemilu 2004 ini cukup spesial, karena keterwakilan 30 % perempuan di Parlemen diberi payung hukum UU meskipun masih setengah hati. Namun, sudahkah masyarakat, partai politik, bisa menerima ini sebagai proses perkembangan politik yang baik? Akankah perempuan benar-benar didorong untuk terlibat dalam urusan politik? Itulah sejumlah pertanyaan yang dijawab dalam Jurnal Perempuan edisi 34 ini.